



PERAN GENERASI MUDA DALAM PERKEMBANGAN POLITIK DI INDONESIA

Anggini Agestia Ibrahim^{1*}, Berril Ezar R², Fathan Nabel³

^{1,2,3}Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: angginiagestia@gmail.com, fathannabel2@gmail.com

Abstrak. Generasi muda memiliki peran strategis dalam membangun masa depan politik Indonesia, terutama sebagai agen perubahan dan regenerasi kepemimpinan. Namun, partisipasi politik generasi muda masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya tingkat partisipasi politik mereka disebabkan oleh apatisisme, kurangnya pendidikan politik, dominasi budaya digital yang sering tidak diikuti oleh tindakan nyata, serta fokus pada isu-isu non-politik. Selain itu, kapasitas dan kesiapan generasi muda untuk terlibat secara aktif dalam politik juga menjadi kendala, yang dipengaruhi oleh minimnya pengalaman praktis, literasi politik yang rendah, dan hambatan budaya politik yang sering mengutamakan patronase. Kesenjangan digital menjadi hambatan lain yang signifikan, di mana akses yang tidak merata terhadap teknologi dan internet menghalangi kelompok tertentu untuk berpartisipasi dalam diskursus politik digital. Terlebih lagi, hambatan struktural dalam sistem politik, seperti desain institusional yang tidak inklusif, aturan pemilu yang membatasi, dan budaya politik yang kaku, mempersempit ruang bagi generasi muda untuk berkontribusi. Akibatnya, regenerasi kepemimpinan terhambat, representasi kelompok muda dalam kebijakan publik minim, dan polarisasi politik semakin meningkat. Upaya untuk meningkatkan peran generasi muda dalam politik Indonesia memerlukan reformasi sistemik, peningkatan literasi politik, penguatan infrastruktur digital, serta keterbukaan struktur politik terhadap inklusivitas. Dengan mengatasi berbagai tantangan ini, generasi muda dapat diberdayakan sebagai aktor utama dalam membangun sistem politik yang lebih demokratis dan representatif di Indonesia.

Kata Kunci : Generasi muda, politik, partisipasi, kesenjangan digital, hambatan struktural

Abstract. The younger generation has a strategic role in building the future of Indonesian politics, especially as agents of change and leadership regeneration. However, the political participation of the younger generation still faces various challenges. The low level of their political participation is caused by apathy, lack of political education, the dominance of digital culture that is often not followed by real action, and a focus on non-political issues. In addition, the capacity and readiness of the younger generation to be actively involved in politics are also obstacles, influenced by minimal practical experience, low political literacy, and barriers to political culture that often prioritize patronage. The digital divide is another significant obstacle, where unequal access to technology and the internet prevents certain groups from participating in digital political discourse. Moreover, structural barriers in the political system, such as non-inclusive institutional design, restrictive election rules, and rigid political culture, narrow the space for the younger generation to contribute. As a result, leadership regeneration is hampered, the representation of young groups in public policy is minimal, and political polarization is increasing. Efforts to increase the role of the younger generation in Indonesian politics require systemic reform, increased political literacy, strengthened digital infrastructure, and openness of political structures to inclusivity. By addressing these challenges, the younger generation can be empowered as key actors in building a more democratic and representative political system in Indonesia.

Keywords: Youth, politics, participation, digital divide, structural barriers.

1. PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara demokratis terbesar ketiga di dunia memiliki potensi besar dalam pengembangan sistem politik yang berkualitas, terutama dengan adanya bonus demografi yang didominasi oleh generasi muda. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), jumlah pemuda Indonesia mencapai 63,82 juta jiwa atau sekitar 23,9% dari total penduduk Indonesia¹. Angka yang signifikan ini menjadikan peran generasi muda sangat strategis dalam menentukan arah perkembangan politik nasional.

Secara historis, generasi muda telah membuktikan perannya yang vital dalam setiap babak penting perjalanan politik Indonesia. Dimulai dari pergerakan kemerdekaan melalui Sumpah Pemuda 1928, yang menjadi momentum penting persatuan bangsa². Peran strategis ini berlanjut pada masa revolusi kemerdekaan, di mana pemuda menjadi ujung tombak perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Senada dengan hal tersebut, Kartodirdjo (2018) menegaskan bahwa sejarah pergerakan nasional Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran kaum muda yang progresif dan visioner.³

Era Orde Lama hingga Orde Baru juga mencatat kontribusi signifikan generasi muda dalam dinamika politik nasional. Gerakan mahasiswa tahun 1966 yang tergabung dalam KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) berhasil mendorong perubahan fundamental dalam sistem politik Indonesia. Demikian pula pada masa Reformasi 1998, di mana mahasiswa dan pemuda menjadi motor penggerak utama yang

mengakhiri 32 tahun kekuasaan Orde Baru, sebagaimana dicatat dalam penelitian Aspinall (2020)⁴.

Memasuki era digital dan demokratisasi, peran generasi muda mengalami transformasi signifikan. Penelitian Nugroho (2021) menunjukkan bahwa generasi muda saat ini memanfaatkan media sosial dan platform digital sebagai instrumen partisipasi politik. Hal ini sejalan dengan temuan Haris (2022) yang mengidentifikasi munculnya bentuk-bentuk baru aktivisme politik berbasis teknologi di kalangan pemuda Indonesia.⁵

Namun, di balik potensi besar tersebut, terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi. Survei nasional yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa masih terdapat 45% pemuda yang apatis terhadap politik⁶. Selain itu, penelitian Firmanzah (2021) mengidentifikasi adanya kesenjangan dalam akses pendidikan politik dan hambatan struktural yang membatasi partisipasi politik generasi muda. Di sisi lain, era digital membuka peluang baru bagi keterlibatan pemuda dalam politik. Studi yang dilakukan oleh Tempo Institute (2023) menunjukkan bahwa 78% pemuda Indonesia aktif menggunakan media sosial untuk mengakses informasi politik dan menyuarakan aspirasinya⁷. Fenomena ini menandakan adanya potensi besar untuk mengoptimalkan peran generasi muda dalam pembangunan politik nasional. Berdasarkan realitas tersebut, menjadi penting untuk mengkaji secara komprehensif peran generasi muda dalam perkembangan politik Indonesia. Kajian ini tidak hanya relevan untuk memahami dinamika politik kontemporer, tetapi juga essential untuk merumuskan strategi penguatan

¹ Badan Pusat Statistik. (2023). "Statistik Pemuda Indonesia 2023". Jakarta: BPS.

² Poesponegoro, M. D. (2019). "Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia". Jakarta: Balai Pustaka.

³ Kartodirdjo, S. (2018). "Pemuda Indonesia dalam Dimensi Sejarah Politik". Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

⁴ Aspinall, E. (2020). "Transformasi Politik Indonesia: Dari Gerakan Mahasiswa hingga Demokrasi". Jakarta: LP3ES.

⁵ Haris, S. (2022). "Aktivisme Digital dalam Politik Indonesia Kontemporer". Jurnal Politik LIPI, 17(1), 23-40.

⁶ LIPI. (2022). "Survei Nasional: Partisipasi Politik Pemuda Indonesia". Jakarta: LIPI Press.

⁷ Tempo Institute. (2023). "Laporan Penelitian: Perilaku Politik Generasi Z di Media Sosial". Jakarta: Tempo.



peran pemuda dalam pembangunan demokrasi Indonesia ke depan

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami Peran Generasi Muda dalam Perkembangan Politik Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pemahaman tentang bagaimana keterlibatan generasi muda dapat mempercepat perubahan positif dalam tata kelola politik dan kebijakan publik. Fokus penelitian adalah mengidentifikasi faktor-faktor utama yang berperan dalam peranan generasi muda dalam politik di Indonesia yang terjadi saat ini. Peneliti bertujuan untuk mengeksplorasi variasi dalam penerapan struktur sosial yang dipengaruhi oleh karakteristik individu, kelompok kelas sosial, serta kondisi politik.

Studi dokumen menjadi metode utama dalam pengumpulan data tertulis. Dokumen yang dianalisis meliputi pentingnya peran generasi muda dalam politik yang disertai tantangan dan peluang. Dengan menganalisis dokumen-dokumen ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman tentang politik yang menjadi landasan peran generasi muda di Indonesia. Untuk menjaga kualitas data dan integritas hasil penelitian, peneliti memastikan bahwa semua dokumen yang digunakan berasal dari sumber yang terpercaya dan diakui, seperti publikasi pemerintah, jurnal akademik, dan laporan evaluasi dari lembaga yang kredibel. Kualitas sumber data ini penting untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan memiliki dasar yang valid dan dapat diandalkan. Langkah terakhir dalam analisis adalah penyusunan temuan utama yang memberikan gambaran menyeluruh tentang Peran Generasi Muda dalam Perkembangan Politik di Indonesia.

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman mengenai Pentingnya Generasi muda dalam politik serta tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan partisipasi politik generasi muda di Indonesia saat ini

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Generasi Muda dalam Perkembangan Politik di Indonesia merupakan hal yang sangat penting bagi kemajuan politik di Indonesia. Namun rendahnya tingkat partisipasi politik generasi muda di Indonesia ini menjadi tantangan dalam politik saat ini karena generasi muda di Indonesia mengalami kurangnya kepedulian generasi muda dalam proses demokrasi, hilangnya kepercayaan terhadap politik, sebagian generasi muda memiliki sikap yang apatis terhadap perpolitikan, kurangnya pendidikan politik dan adanya pengaruh budaya populer serta domiasi dari media sosial. Hal ini membuat minimnya representasi karena ketika generasi muda tidak terlibat dalam proses politik, kebijakan yang dihasilkan sering kali tidak mencerminkan kebutuhan mereka dan stagnansi demokrasi karena partisipasi yang rendah melemahkan kualitas demokrasi karena kekuatan suara muda yang seharusnya menjadi penggerak perubahan tidak termanfaatkan. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi generasi muda saat ini ialah peningkatan pendidikan politik dengan memasukkan kurikulum yang lebih berfokus pada kesadaran politik dan demokrasi di tingkat sekolah dan universitas, fasilitas diskusi politik dengan cara meningkatkan dialog terbuka antara generasi muda dan pembuat kebijakan melalui forum atau komunitas lokal, memperkenalkan tokoh politik muda yang inspiratif untuk meningkatkan minat generasi muda dalam dunia politik dan melakukan

kampanye media sosial dengan menggunakan platform populer untuk menjangkau generasi muda dengan pesan yang kreatif dan relevan.

Generasi muda memiliki potensi besar untuk menjadi motor perubahan dalam politik, namun banyak yang menghadapi kendala terkait kapasitas dan kesiapan mereka untuk berpartisipasi secara efektif dalam dunia politik. Hal itu dapat terjadi karena generasi muda saat ini mengalami minimnya pendidikan politik yang formal membuat generasi muda kurang memahami sistem politik, proses pembuatan kebijakan, dan peran mereka dalam demokrasi, kurangnya pengalaman praktis seperti bergabung dengan organisasi atau partai politik, masih rendah di kalangan generasi muda, dan struktur politik yang didominasi oleh aktor senior sering kali kurang memberikan ruang bagi generasi muda. Budaya patronase di partai politik juga mempersulit generasi muda untuk menonjol serta kurangnya kepercayaan diri dari sebagian generasi muda. Ini lah yang menjadi faktor mengapa generasi muda mengalami kurangnya kesiapan dan kapasitas dalam perpolitikan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi hal tersebut ialah memeberikan ruang bagi generasi muda untuk dapat ikut serta dalam politik, mengadakan pelatihan dan seminar politik untuk generasi muda melalui organisasi masyarakat sipil dan mendorong generasi muda untuk terlibat dalam politik lokal sebagai langkah awal membangun kapasitas mereka serta politisi senior dapat menjadi mentor bagi generasi muda untuk membantu mereka memahami dinamika politik dan membangun kepercayaan diri.

Era digital telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat berpartisipasi dalam politik seperti internet, media sosial, dan teknologi digital telah menjadi alat penting dalam membangun kesadaran politik, menggalang dukungan, dan menyuarakan aspirasi. Namun, kesenjangan digital (digital divide) menjadi hambatan yang signifikan dalam memastikan inklusivitas partisipasi politik karena tidak semua individu memiliki akses internet atau perangkat yang memadai untuk mengakses informasi politik dan memiliki kemampuan

untuk memanfaatkan teknologi untuk tujuan politik, seperti berdiskusi di forum digital atau mengikuti kampanye daring, adanya ketimpangan ekonomi dimana akses ke teknologi sering kali membutuhkan biaya, baik untuk perangkat keras maupun koneksi internet, adanya kesenjangan Infrastruktur dimana daerah pedesaan atau terpencil sering kali kekurangan infrastruktur TIK, seperti jaringan internet atau listrik yang stabil dan kurangnya pemahaman terhadap digital. Hal ini membuat suara dari kelompok yang tidak memiliki akses atau kemampuan digital sering kali tidak terdengar dalam diskusi politik online, akses yang tidak merata menciptakan kelompok-kelompok yang terisolasi dari narasi politik utama, yang dapat memperkuat polarisasi sosial. kelompok seperti masyarakat miskin, perempuan di pedesaan, dan komunitas adat sering kali semakin terpinggirkan dalam proses politik karena kurangnya akses digital. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kesenjangan digital yaitu pemerintah perlu memastikan pemerataan infrastruktur TIK, termasuk akses internet, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, adanya program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi untuk partisipasi politik, penyediaan subsidi atau bantuan perangkat dan koneksi internet bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu dan menggunakan media alternatif seperti radio atau televisi untuk menyebarkan informasi politik kepada kelompok yang belum memiliki akses digital.

Hambatan struktural dalam sistem politik adalah berbagai kendala yang melekat pada struktur institusional dan proses politik yang dapat membatasi partisipasi, perwakilan, dan efektivitas demokrasi yang sering kali mengakar dalam tata kelola, kebijakan, atau praktik yang menciptakan ketimpangan akses dan menghambat perubahan sistemik. Hambatan ini berupa dominasi elite politik dimana struktur politik sering kali didominasi oleh kelompok elite yang memiliki kekuatan ekonomi atau pengaruh sosial yang menciptakan oligarki yang mempersempit peluang partisipasi



bagi kelompok masyarakat lainnya, sistem Kepartaian yang tertutup dimana banyak sistem politik, termasuk di Indonesia, mengadopsi sistem kepartaian yang cenderung eksklusif, dengan proses kaderisasi dan pengambilan keputusan yang tidak transparan, proses administratif dan birokrasi yang rumit, ketimpangan Akses Ekonomi dan Pendidikan dan Sistem politik sering kali memperkuat sekat-sekat identitas, seperti suku, agama, dan gender, sehingga kelompok tertentu terpinggirkan. Hal ini membuat minimnya representasi kelompok rentan, ketidakpuasan dan apatisisme Politik dan menurunnya kepercayaan Publik. Dalam hal ini upaya yang dapat dilakukan ialah membuka proses kaderisasi partai yang lebih inklusif dan transparan, mendorong program literasi politik di daerah terpencil, menyederhanakan proses administratif dan memperkenalkan teknologi untuk mengurangi hambatan birokrasi dan memberikan lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendekatkan pengambilan keputusan dengan masyarakat serta mendorong kebijakan afirmatif untuk meningkatkan representasi kelompok perempuan, minoritas, dan masyarakat adat dalam lembaga politik.

4. KESIMPULAN

Rendahnya tingkat partisipasi politik generasi muda merupakan tantangan besar bagi demokrasi modern. Dengan langkah-langkah strategis seperti pendidikan politik, keterlibatan media sosial, dan fasilitasi dialog, generasi muda dapat diberdayakan untuk menjadi aktor penting dalam proses politik. Hal ini juga bukanlah sekadar persoalan individual, melainkan tantangan sistemik yang memerlukan pendekatan komprehensif dari berbagai pemangku kepentingan.

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

Kurangnya kapasitas dan kesiapan generasi muda dalam politik merupakan tantangan besar yang dapat menghambat regenerasi kepemimpinan dan perkembangan demokrasi. Namun, kurangnya kapasitas generasi muda dalam politik bukanlah kondisi permanen, melainkan tantangan yang dapat diatasi melalui upaya sistematis dan berkelanjutan. Hal ini dapat dikurangi dengan cara pendidikan politik yang lebih baik, akses yang inklusif dalam partai politik, dan dukungan dari berbagai pihak, generasi muda dapat diberdayakan untuk memainkan peran yang lebih signifikan.

Kesenjangan digital dalam partisipasi politik menciptakan ketimpangan dalam demokrasi modern seperti akses yang tidak merata, literasi digital yang rendah, dan infrastruktur yang terbatas menjadi kendala utama yang harus diatasi untuk menciptakan partisipasi politik yang inklusif. Kesenjangan digital dalam partisipasi politik juga merupakan potret ketidakadilan, bukan sekadar persoalan teknis, melainkan tantangan kemanusiaan yang membutuhkan solusi komprehensif. Namun, dengan langkah-langkah strategis, seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan literasi digital, semua kelompok masyarakat dapat diberdayakan untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik.

Hambatan struktural dalam sistem politik menjadi tantangan besar untuk mencapai demokrasi yang inklusif dan representatif. Meskipun hambatan ini bukan kondisi permanen, melainkan tantangan yang dapat diatasi melalui upaya sistematis, konsisten, dan partisipatif tetapi sering kali kompleks dan sulit diubah. Reformasi yang fokus pada transparansi, aksesibilitas, dan inklusivitas diperlukan untuk mengatasi kendala ini dengan memodernisasi sistem politik dan meningkatkan pendidikan politik, hambatan struktural dapat

diminimalkan, sehingga demokrasi menjadi lebih kuat dan representatif

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ambardi, K. (2023). "Tren Politik Digital di Kalangan Pemuda". *Jurnal Komunikasi Politik*, 7(1), 12-28.
- Aspinall, E. (2019). "Transformasi Politik Indonesia Kontemporer". Jakarta: LP3ES.
- Aspinall, E. (2020). "Transformasi Politik Indonesia: Dari Gerakan Mahasiswa hingga Demokrasi". Jakarta: LP3ES.
- Badan Pusat Statistik. (2023). "Statistik Pemuda Indonesia 2023". Jakarta: BPS.
- Firmanzah. (2021). "Partisipasi Politik di Era Digital". Jakarta: UI Press.
- Haris, S. (2020). "Politik Generasi Milenial". Jakarta: LIPI Press.
- Haris, S. (2022). "Aktivisme Digital dalam Politik Indonesia Kontemporer". *Jurnal Politik LIPI*, 17(1), 23-40.
- Kartodirdjo, S. (2018). "Pemuda Indonesia dalam Dimensi Sejarah Politik". Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kartodirdjo, S. (2019). "Pemuda dalam Sejarah Politik Indonesia". Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Lembaga Survei Indonesia. (2023). "Laporan Survei: Perilaku Politik Pemuda Indonesia". Jakarta: LSI.
- LIPI. (2022). "Survei Nasional: Partisipasi Politik Pemuda Indonesia". Jakarta: LIPI Press.
- LIPI. (2023). "Survei Nasional: Pola Partisipasi Politik Pemuda". Jakarta: LIPI Press.
- Notosusanto, N. (2020). "Sejarah Pergerakan Mahasiswa Indonesia". Jakarta: Balai Pustaka.
- Nugroho, Y., & Syarief, S. S. (2022). "Media Sosial dan Aktivisme Digital". Jakarta: Gramedia.
- Nurhasim, M. (2022). "Transformasi Partisipasi Politik Pemuda". *Jurnal Politik LIPI*, 18(1), 45-62.
- Poesponegoro, M. D. (2019). "Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia". Jakarta: Balai Pustaka.
- Republik Indonesia. (2009). "Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan". Jakarta: Sekretariat Negara.
- Suyanto, B. (2020). "Sosiologi Generasi Z Indonesia". Surabaya: Airlangga University Press.
- Tempo Institute. (2022). "Analisis Peluang Politik Generasi Z". Jakarta: Tempo.
- Tempo Institute. (2023). "Laporan Penelitian: Perilaku Politik Generasi Z di Media Sosial". Jakarta: Tempo.
- Universitas Indonesia. (2023). "Studi Longitudinal: Partisipasi Politik Pemuda 2019-2023". Jakarta: FISIP UI